



## PERAN INLANDSCH BESTUUR SIDOARDJO DALAM MENANGANI PERISTIWA GEDANGAN TAHUN 1904

Nanda Pramudya Fadli Illahi<sup>a</sup>

*nanda.pramudya.1907326@students.um.ac.id*

<sup>a</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia.

### ARTICLE INFO

Received: 1<sup>st</sup> December 2021

Revised: 11<sup>th</sup> December 2021

Accepted: 20<sup>th</sup> December 2021

Published: 30<sup>th</sup> December 2021

### Permalink/DOI

10.17977/um021v15i22021p227-238

Copyright © 2021.  
Sejarah dan Budaya  
Email: [jsb.journal@um.ac.id](mailto:jsb.journal@um.ac.id)  
Print ISSN: 1979-9993  
Online ISSN: 2503-1147

### ABSTRACT

The Gedangan incident, Sidoarjo which occurred in 1904 was an event of a rebellion carried out by a man named Kyai Kassan / Hassan Moekmin with his followers. The background was the various problems that emerged in Regentschap Sidoarjo at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century regarding the condition of society which was increasingly miserable with new projects from the Dutch East Indies colonial government. He himself carried out a rebellion that claimed many lives both on the rebel side and the government. In this case the colonial government relied on its employees in the surrounding area, from the Regent, the Wedana, to the Village Head. By the colonial government, these employees were referred to as Inlands Bestuur or indigenous employees. Their role in dealing with this rebellion largely determined the decisions that the Dutch East Indies officials would take at that time.

### KEYWORDS

Role; Inlands Bestuur; Gedangan Insurgance

### ABSTRAK

Peristiwa Gedangan, Sidoarjo yang terjadi tahun 1904 merupakan peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh seorang bernama Kyai Kassan / Hassan Moekmin bersama para pengikutnya. Dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang muncul di Regentschap Sidoarjo pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 tentang kondisi masyarakat yang semakin sengsara dengan proyek-proyek baru dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dirinya melakukan pemberontakan yang memakan tidak sedikit korban jiwa baik di pihak pemberontak maupun pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kolonial mengandalkan pegawainya yang ada di daerah sekitar mulai dari Bupati, Wedana, sampai Lurah. Oleh pemerintah kolonial, para pegawai ini disebut sebagai Inlandsch Bestuur atau pegawai pribumi. Peranan mereka dalam menangani pemberontakan ini sangat menentukan keputusan yang akan diambil oleh para pejabat Hindia-Belanda saat itu.

### KATA KUNCI

Peran; Inlands Bestuur; Peristiwa Gedangan

## PENDAHULUAN

Gedangan kini adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo. Namun pada masa kolonial belanda antara abad ke-19 dan awal abad ke-20, wilayah Gedangan merupakan salah satu kawedanan atau distrik dari 6 distrik yang ada di *Regentschap Sidoardjo* seringkali ditulis dalam peta sebagai Distrik Jenggolo I. Masyarakat Gedangan pada waktu itu banyak yang bekerja sebagai petani dan mempunyai tanah garapan yang luas meskipun harus berbagi dengan lahan tebu milik pabrik gula yang ada di sekitar Gedangan itu sendiri. Diantara pabrik gula yang ada di Gedangan adalah Pabrik Gula Sroeni yang terletak di sebelah jalan raya Sidoarjo menuju Surabaya. Pada awal abad ke-20 tepatnya pada tanggal 27 Mei 1904 terjadi peristiwa pemberontakan oleh masyarakat di Gedangan yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Gedangan 1904.

Pemberontakan ini didominasi oleh para pengikut seorang yang dianggap sebagai Kyai bernama Hassan / Kassin Moekmin bersama para pengikutnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sepanjang sejarah pemberontakan-pemberontakan petani, pemimpin-pemimpinnya jarang sekali petani biasa. Mereka berasal dari golongan-golongan penduduk pedesaan yang lebih berada dan lebih terkemuka, dan mereka adalah pemuka-pemuka agama, anggota-anggota kaum ningrat atau orang-orang yang termasuk golongan penduduk desa yang terhormat, jadi orang-orang yang statusnya memudahkan penilaian mengenai tujuan suatu gerakan dan yang dapat berfungsi sebagai suatu fokus simbolis (Kartodirdjo, 1984 : 6). Begitu juga yang terjadi di peristiwa Gedangan tahun 1904 ini, tokoh utama dari pemberontakan adalah seorang yang dianggap sebagai pemuka agama di desa Sumantoro bernama Hassan / Kassin Moekmin (Penyebutan nama ini banyak yang berbeda dalam berbagai sumber berupa koran sezaman, ada yang menyebut sebagai Kassin dan ada pula yang menyebut sebagai Hassan).

Hal yang akhirnya membuat Kyai Kassin Moekmin melakukan pemberontakan pada pemerintah seperti yang dirangkum oleh Dukut Imam Widodo dalam buku yang berjudul "*Sidoardjo Tempo Doeloe*" dan dikutip oleh Ulil Azmil Umroh pada skripsinya berjudul "*Kyai Hassan Mukmin*": (1) Melalui sebuah perusahaan trem uap OJS (Oost Java Stoomtram) Belanda sudah mulai menekan warga Gedangan dengan pembangunan jalur rel di Krian-Sepanjang-Wonokromo hingga ke ujung Surabaya. Pembangunan itu membongkar paksa makam-makam leluhur yang sangat dihormati oleh penduduk; (2) Upaya Kristenisasi melalui *pipo londo* yang terbuat dari logam, atau *carbonsteel*. Pada tahun 1890, seorang pengusaha Belanda bernama Birnie mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pengadaan air minum bersih dari Umbulan Pasuruan ke Surabaya dengan jaringan *pipo londo*. Namun masyarakat mulai curiga terhadap aliran air yang sampai kerumah-rumah warga karena berwarna putih susu. Muncullah kabar bahwa pencemaran air tersebut berasal dari sumber yang dicampur dengan *banyu srani* atau Nasrani. Maka masyarakat akhirnya menyimpulkan telah dilakukan upaya kristenisasi oleh Pemerintah Hindia-Belanda; (3) Masalah paling besar datang dari sengketa tanah antara rakyat Sidoarjo dengan pemerintah daerah dan rakyat Sidoarjo dengan pemerintah koloni. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan tentang pajak tanah yang sudah menjadi milik rakyat sejak lama. Ini dilakukan untuk mendesak rakyat agar

mau menjual tanahnya pada raja-raja gula. Bahkan tidak hanya tanah, tetapi juga tambak-tambak bandeng dan udang yang menjadi warisan leluhur selama berabad-abad juga dikenakan pajak yang cukup besar (Umroh, 2017 : 3-4).

Terjadinya pemberontakan ini kemudian juga menjadi perhatian bagi penguasa saat itu yaitu Pemerintah Hindia-Belanda melalui wakilnya di daerah dalam hal ini Pemerintah Karesidenan Soerabaia dan Regent Sidoardjo. Sehingga segala tindakan yang diambil oleh pemerintah Hindia-Belanda adalah berdasarkan keterangan dari pemerintah daerah. Untuk diketahui bahwa pada masa itu Belanda menerapkan pemerintahan *indirect-rule* atau pemerintahan tidak langsung. Maksudnya adalah mempercayakan pemerintahan di daerah pada penguasa lokal atau mereka menyebutnya sebagai *Inlandsch Bestuur*. Seperti dituliskan Heather Sutherland dalam bukunya berjudul "*Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*" bahwa Kepegawaian sipil pribumi di Jawa pada masa akhir pemerintahan kolonial sebuah nama yang mengesankan : Pangreh Praja, "Penguasa Kerajaan". Tetapi gelar ini, meskipun dengan pancaran kebanggaan kekuasaannya memang dapat dibenarkan, sekaligus sedihnya karena tidak tepat. Karena bila dalam konteks pribumi para pejabat berarti pangreh praja, maka bagi Belanda mereka itu adalah *inlandsch bestuur* atau "pemerintahan pribumi", suatu tingkat yang lebih rendah dari pemerintah setempat. Pejabat-pejabat pribumi itu merupakan suatu kelas penguasa yang ditakuti dan dikagumi, tetapi mereka itu merupakan wakil-wakil bawahan dari sebuah kekuasaan asing (Sutherland, 1983 : 25).

Susunan *Inlandsch Bestuur* di Regentschap Sidoarjo pada saat terjadinya Peristiwa Gedangan adalah Bupati Sidoarjo bersama dengan Asisten Residen yang berada dibawah kekuasaan Residen Surabaya, disusul dengan bawahan bupati di tingkat kawedanan atau distrik yaitu Wedana, kemudian tingkat terendah berada di tingkat desa yaitu lurah atau kepala desa. Dimana ini merupakan susunan dari pemerintahan yang ada pada tahun 1904 dan mempunyai kontribusi penting dalam segala bentuk penanganan pada pemberontakan gedangan tersebut, baik itu berupa laporan, dokumentasi, maupun aksi langsung di lapangan. Tanpa adanya peran dari mereka (yang berada dalam sistem pemerintahan tersebut) maka mungkin peristiwa gedangan pada masa sekarang ini sudah terlupakan.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah membahas tentang latar belakang, bagaimana, dan pasca peristiwa pemberontakan gedangan ini. Sementara, juga ada penelitian yang membahas tentang Kyai Hassan Mukmin ini secara histori dan biografis. Maka dari itu, yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya adalah penelitian ini berusaha membahas secara spesifik peranan dari para *Inlandsch Bestuur* yang ada di Sidoarjo pada tahun 1904 dalam prosesnya menangani peristiwa gedangan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang didapat dari penelitian adalah : (1) Bagaimana struktur pemerintahan *Inlandsch Bestuur* (IB) dan *Binnenlands Bestuur* (BB) Sidoarjo yang menangani peristiwa gedangan ? (siapa dan apa jabatannya pada saat itu); (2) Bagaimana jalannya peristiwa gedangan tahun 1904 ? ; Lalu (3) Bagaimana peran para *Inlandsch Bestuur* tersebut pada saat dan pasca terjadinya peristiwa gedangan tahun 1904 ?

## METODE

Dalam penelitian tentang peran *Inlandsch Bestuur* dalam peristiwa Gedangan tahun 1904 ini penulis menggunakan penelitian secara kualitatif-deskriptif. Maksudnya adalah penulis memakai sumber yang telah penulis dapatkan dari berbagai media online dan juga buku untuk kemudian dimasukkan dalam tulisan ini dan dijelaskan secara deskriptif. Penulis menampilkan data-data yang didapatkan secara apa adanya dalam tulisan ini dengan menggunakan analisis terhadap tiap permasalahannya secara kualitatif. Maka dari itu diharapkan nantinya penelitian ini dapat menjadi sumber yang kredibel untuk dapat dijadikan sumber bagi penelitian serupa yang lain di kemudian hari.

Kemudian dalam penelitian ini juga penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 5 proses. Kelima proses tersebut dimulai dari : (1) Penentuan Tema, saat menentukan tema penelitian ini penulis terinspirasi dari tulisan Dukut Imam Widodo dalam bukunya yang berjudul "*Sidoardjo Tempo Doeloe*" yang beberapa bagiannya membahas tentang peristiwa gedangan tahun 1904. Kemudian penulis mulai coba mencari sumber-sumber lain dari peristiwa gedangan ini dan ternyata ada beberapa topik yang belum dibahas, salah satu diantaranya adalah peran dari para *Inlandsch Bestuur* di Sidoarjo tahun 1904 dalam menangani peristiwa gedangan. Maka dari itu, kemudian penulis memutuskan untuk meneliti dan menuliskannya.

(2) Proses heuristik atau pencarian sumber, dalam proses ini penulis menggunakan berbagai sumber yang didapatkan baik dari media online maupun buku. Sumber yang didapatkan dari media online antara lain penulis dapatkan dari website *delpher.nl* berupa koran-koran sezaman yang memberitakan tentang peristiwa gedangan ini. Kemudian penulis juga menggunakan website tersebut untuk mencari laporan Bupati Sidoarjo dan Residen Surabaya seputar peristiwa gedangan. Hasilnya banyak sekali sumber arsip koran yang berhasil didapatkan. Penulis juga menggunakan skripsi dari mahasiswa sejarah peradaban islam UIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang Kyai Hassan Mukmin tokoh penting dibalik meletusnya peristiwa tersebut. Dalam buku, penulis mendapatkan 2 buku, yakni buku dari Dukut Imam Widodo berjudul *Sidoardjo Tempo Doeloe* dan buku berjudul *Sejarah Sidoarjo* yang ditulis oleh Panitia Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo.

(3) Proses selanjutnya yaitu kritik sumber, dalam proses kritik sumber ini terdapat 2 kritik berupa kritik eksternal dan internal. Pada tahap kritik eksternal penulis melakukan kritik terhadap darimana sumber-sumber didapatkan saat proses heuristik. Sumber berupa skripsi yang didapatkan dari perpustakaan online universitas, kemudian buku-buku yang dipastikan kembali penulis dan penerbitnya jelas, serta sumber dokumentasi berupa foto yang penulis dapatkan apakah sumber tersebut masuk kedalam kategori sumber primer, sekunder, atau tersier. Sementara pada tahap kritik internal, penulis berusaha memastikan kembali keotentikan dari sumber-sumber yang telah penulis dapatkan diatas.

Proses selanjutnya yaitu (4) Interpretasi, dalam proses ini penulis melakukan pemaknaan terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh dan sebelumnya telah melewati proses kritik sumber terlebih dahulu. Penulis menginterpretasi fakta-fakta

sejarah yang terdapat dalam sumber-sumber tadi untuk kemudian diklasifikasikan, ditata, dan disusun agar dapat menjadi sebuah tulisan sejarah yang baik pada proses setelahnya yaitu historiografi. (5) Proses Historiografi, dalam proses historiografi ini penulis berusaha untuk menuliskan segala yang telah penulis dapatkan dalam keempat proses sebelumnya. Menuliskan fakta-fakta sejarah yang telah diinterpretasikan pada pemahaman penulis dan berusaha untuk menyampaikannya secara jelas dan runtut sesuai dengan analisa sejarah. Diharapkan setelah hasil karya ilmiah dari penulis ini sudah selesai akan memberikan pengetahuan baru bagi para pembacanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur *Inlandsch Bestuur* di Sidoarjo

Seperti yang telah dibahas sedikit pada bagian pendahuluan, bahwa *Inlandsch Bestuur* merupakan pemerintahan pribumi yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial di Hindia-Belanda yang menerapkan sistem indirect rule atau pemerintahan tidak langsung. Lalu bagaimana sebenarnya struktur pemerintahan di Hindia-Belanda secara menyeluruh? Hindia-Belanda dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang bertempat di Batavia, kemudian gubernur jenderal mempunyai bawahan lagi untuk mengontrol wilayah-wilayah yang disebut sebagai Karesidenan. Wilayah karesidenan dipimpin oleh seorang residen yang membawahi wilayah-wilayah *regentschap* serta *gemeente*. Dibawah karesidenan terdapat pemerintahan kabupaten yang disebut sebagai *regentschap* dan dipimpin oleh bupati dibantu oleh patih dengan diawasi oleh asisten residen. Bupati membawahi wilayah distrik atau kawedanan yang dipimpin oleh wedana, dan membawahi wilayah desa yang dipimpin oleh lurah atau kepala desa. Selain itu terdapat juga *controleur* yang merupakan bawahan dari asisten residen untuk mengawasi perkebunan serta aset-aset vital pemerintah kolonial lainnya di daerah.

Struktur pemerintahan yang sedemikian rupa kemudian terbagi menjadi 2 untuk kategori kepegawaiannya. Kategori pegawai tersebut terbagi menjadi *Binnenlands Bestuur* (BB) dan *Inlandsch Bestuur* (IB). Dimana *Binnenlands Bestuur* adalah sebutan untuk para pegawai yang terdiri dari orang Belanda / Eropa dan bekerja dalam pemerintahan dalam negeri kolonial. Sedangkan *Inlandsch Bestuur* merupakan sebutan bagi pegawai pribumi yang bekerja sebagai pegawai kolonial atau biasa juga disebut sebagai pangreh praja. Walaupun terjadi klasifikasi atau penggolongan terhadap kepegawaian kolonial, tetapi keduanya tetap saling membutuhkan satu sama lain.

Hubungan Kolonial itu merupakan suatu kerja sama politik yang tidak setara, yang diisyaratkan secara hakiki oleh hubungan yang dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang antara kepegawaian Eropa, BB (*Binnenlands Bestuur*, Pemerintahan Dalam Negeri) dan *pangreh praja*. Interaksi antara keduanya berlangsung bukan sesederhana hubungan administrasi atasan dan bawahan, melainkan juga merupakan kekuatan tawar-menawar yang berkesinambungan antara kedua elite itu dengan latar belakang budaya dan ras yang berbeda (Sutherland, 1983 : 26-27).

Hal ini juga terjadi di Sidoarjo, sebagai sebuah *regentschap* atau kabupaten yang berada dibawah kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Maka Sidoarjo sesuai dengan

letak geografisnya yang berada di sebelah selatan wilayah Surabaya kemudian menjadi bagian dari Karesidenan Surabaya. Dengan begitu maka, struktur pemerintahannya tak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. perbedaannya hanya terletak pada tiap orang yang menjabat sebagai kepala Inlandsch Bestuur mempunyai pasukan pengamanan atau biasa disebut opas sendiri-sendiri.

Pada saat terjadinya peristiwa gedangan tanggal 27 Mei 1904, Regentschap Sidoarjo dipimpin oleh seorang bupati bernama Raden Adipati Tjondronegoro / Tjondronegoro I. Bupati ini berasal dari patih (ronggo) Jombang dan mulai menjabat pada tahun 1883 menggantikan bupati sebelumnya yaitu RTAA Tjokronegoro II yang mendapat pensiun di tahun tersebut (PPSKS, 2009 : 15). Sedangkan pada waktu itu yang menjabat sebagai Residen Surabaya adalah E.C.A.F Lange yang nantinya juga turut serta dalam menangani pemberontakan. Sementara wakil pejabat BB di Sidoarjo yang pada saat itu sedang menjabat sebagai asisten residen, bernama Th. A. Smulders. Pada waktu itu bukan hanya bupati saja dari kalangan pejabat IB yang terlibat, tetapi para pejabat IB yang berada dibawah kuasa bupati juga turut terlibat. Diantaranya : wedana krian bernama Raden Djojo Adiputro, asisten wedana taman, wedana gedangan bernama Mas Prawiro Dimedjo, lurah gedangan, dan wedana boelang bernama Raden Djojo Adiningrat.

Kebanyakan dari sumber yang ada tidak menyebutkan secara detail nama-nama pejabat IB yang berada dibawah kekuasaan Bupati Sidoarjo. Hanya Wedana Bulang saja pejabat setingkat wedana yang secara jelas disebutkan namanya karena ia ternyata memilih untuk berpihak pada pihak pemberontak. Sementara itu selain para pejabat pemerintahan, para petinggi militer juga terlibat dalam penanganan peristiwa gedangan ini. Para pemimpin dari pihak militer Hindia-Belanda yang terlibat diantaranya : Kapten C.H Hoedt dari kesatuan KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda), Raden Tjondrokusumo dari satuan Opas (Petugas Keamanan) Bupati. Dalam catatan bupati Sidoarjo pada 30 Mei 1904, sebenarnya terdapat satuan lain yang dituliskan dalam catatan. Satuan itu antara lain berasal dari pamong praja dan kepolisian tetapi tidak disebutkan siapa tokoh yang ikut serta dalam peristiwa itu. Tokoh-tokoh diatas adalah yang terdapat dalam arsip seputar peristiwa gedangan.

### **Jalannya Peristiwa Gedangan**

Peristiwa Gedangan terjadi pada tanggal 27 Maret 1904 dan dimulai pada pukul 11.00 pagi. Hal ini dapat diketahui dari laporan telegram yang dikirim oleh Residen Surabaya bernama E.C.A.F Lange dan dikutip oleh koran Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage yang terbit pada tanggal 30 Juni 1904 atau sebulan pasca terjadinya peristiwa Gedangan. Bunyi laporan telegram itu kurang lebih seperti berikut :

*“Pagi ini pada pukul sebelas ada laporan tentang gangguan yang terjadi di Sidoarjo. Saya sendiri pergi kesana dengan kereta api pukul setengah satu dengan bantuan militer. Tapi belum tahu detailnya. Hari ini dengan lima puluh bawahan, seorang kapten dan seorang letnan dua tiba di Gedangan. Menurut laporan, penggagas gerakan pemberontakan tersebut adalah Kassin Moekmin, guru spiritual dari Djogja dan tinggal di desa Sumantoro. Tadi malam dia mengumpulkan para pengikutnya ke taman alang-alang, bermaksud untuk memproklamkan perang sabil”* (Dagblad, 30 Juni 1904). Disebutkan

dalam telegram itu bahwa pemimpin gerakan adalah seorang guru spiritual bernama Kassin Moekmin yang berasal dari desa Sumantoro, Distrik Gedangan. Menurut Ulil Azmil Umroh dalam skripsinya, Kyai Hassan Mukmin adalah putra dari seorang ulama besar di Yogyakarta yang memimpin tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1854 M dan merupakan anak satu-satunya. Nama panggilan kecilnya adalah Sebloe, seperti nama ibu asuhnya. Ketika menginjak dewasa ia dipanggil Durrachman hingga kemudian ia kembali dipanggil dengan nama Hasan Mukmin. Ia menikah dengan perempuan asal Sidoarjo yang dikenal dengan nama Mbok Markamah (Umroh, 2017 : 9).

Sebelum menikah dengan mbok Markamah, ia tinggal di daerah Krian tepatnya di desa Semambung dan berprofesi sebagai pedagang tikar. Di desa Semambung ia membentuk komunitas yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang menaruh kepercayaan dan kesetiaan padanya. Kegiatannya di samping menyebarkan agama juga membantu menyembuhkan penyakit. Selain itu dia juga memberikan jimat kepada para pengikutnya yang sebagian berprofesi sebagai nelayan dan petani agar hasil panennya melimpah. Berangkat dari kebiasaannya tersebut akhirnya ia semakin tertantang untuk berdakwah dalam tingkatan yang lebih luas. Ia kemudian lebih dikenal sebagai guru agama dan dukun ketimbang profesi awalnya sebagai pedagang tikar.

Didorong oleh keyakinannya selama dianggap sebagai dukun dan guru agama bahwa nantinya akan turun Imam mahdi untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan yang jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat masa kolonial sangat sesuai. Maka, kemudian Kyai Kassin Moekmin mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi yang akan menyelamatkan rakyat dari kondisi kesengsaraan selama masa kolonial tersebut. Setelah itu ia bersama para pengikutnya merencanakan perang suci atau perang sabil yang akan dilaksanakan bertepatan dengan hari kelahiran nabi Muhammad atau Maulid Nabi yang jatuh pada tanggal 27 Mei tahun 1904. Alhasil persiapan aksi pemberontakan mulai dilakukan demi kelancaran aksi pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut.

Menurut laporan dari bupati Sidoarjo Raden Adipati Tjondronegoro yang berhasil menangkap salah satu pemberontak bernama Haji Abdoel Gani dari desa Damarsi untuk dijadikan narasumber. Dan laporan ini kemudian diterjemahkan Dukut Imam Widodo dalam bukunya yang berjudul "*Sidoarjo Tempo Doeloe*". Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa persiapan pemberontakan sudah mulai dilakukan pada tanggal 25 Mei 1904. Dimana salah satu menantu kyai Kassin yang bernama pak Rupiah datang untuk menemui Abdoel Gani dengan perintah untuk mempersiapkan perang sabil pada tanggal 27 Mei nantinya. Kemudian Abdoel gani segera berangkat untuk menemui rekan pemberontak lainnya yang telah berkumpul lebih dulu di rumah Kyai Ngari desa Wagir. Disana ia bersama 8 orang lainnya dan dua orang yang datang menyusul membawa bendera putih dengan umbul-umbul klaras (daun pisang kering).

Pada malam hari itu juga ia bersama rakan-rekannya tersebut pergi ke sawah di desa Keboan Pasar sambil membawa bendera tadi. Kemudian pada pukul 10 malam, ia bersama rekan-rekannya menancapkan bendera tadi di tanah yang sudah digali sebelumnya oleh 7 orang dari Keboan Pasar. Pada pukul 11 malam bendera mulai berkibar (Widodo, 2013 : 207-208). Hal ini didukung oleh keterangan yang didapatkan

dari berita yang diterbitkan oleh koran Het Nieuws Van Den Dag pada tanggal 22 Juni tahun 1905. Pada bagian yang membahas tentang perkembangan kasus gedangan ini, ditulis sebagai berikut :

*“... bahwa kemudian dengan bersenjatakan pedang, tombak, keris, dan parang mereka berkumpul di sawah dekat Keboan Pasar dan menancapkan panji pemberontakan di sana sebagai lambang kerajaan baru yang akan didirikan, yang panji-panji terdiri dari putih-biru-putih. Bendera tersebut berposisi di atas tiang bambu yang dilapisi dengan daun pisang kering; bahwa pada saat itulah mereka berteriak “Sabilullah!” telah pergi ke desa Keboan Sikep...”* (Het Nieuws Van Den Dag, 22 Juni 1905).

Suasana jalannya pemberontakan sendiri dapat dinarasikan secara singkat dari berita-berita dalam berbagai koran sezaman yang memberitakannya, bahwa pada pukul 11 pagi para pemberontak mulai menyerukan perang sabil di sawah desa Keboan Pasar tepatnya di seberang dan sisi kanal mangetan. Sementara itu sebelumnya mereka sudah berkumpul pada pukul 6.30 pagi. Sedangkan pukul 10 pagi Kyai Kasan moekmin selaku pemimpin pemberontak datang ke lokasi tempat pemberontakan berkumpul. Mendengar kejadian itu Bupati Sidoarjo Raden Adipati Tjondronegoro bersama Asisten Residen Th. A. Smulders dan controleurnya bernama P.H. Frolich berangkat ke Gedangan ditemani oleh Opas, pamong praja, dan polisi. Tetapi sebelum menuju lokasi kejadian di Keboan Pasar, mereka lebih dulu menuju stasiun Gedangan untuk menjemput Residen Surabaya bernama E.C.A.F Lange yang dikabarkan telah berangkat dari Surabaya ke Gedangan pada pukul setengah satu siang dikawal oleh 50 tentara KNIL yang dipimpin oleh Kapten C.H Hoedt dan seorang letnan dua untuk menangani secara langsung peristiwa yang terjadi.

Kemudian pukul 2 siang Residen tiba di Stasiun Gedangan dan disambut oleh rombongan bupati beserta asisten residen. Residen beristirahat sejenak sebelum akhirnya pukul setengah 3 ia bersama rombongan bupati dan asisten residen pergi ke tempat kejadian di desa Keboan Pasar. Namun dari 50 tentara KNIL tadi sebagian diarahkan ke daerah Sepanjang untuk mengantisipasi pemberontakan juga yang terjadi disana. Dalam perjalanan menuju lokasi, rombongan residen bertemu dengan lurah Gedangan yang berhasil lolos dari tangkapan para pemberontak. Sementara itu para pemberontak berhasil menangkap Wedana Gedangan dan membunuh opasnya. Mendengar kabar itu rombongan residen langsung bergegas menuju lokasi. Mereka tiba di desa Keboan Pasar pada sekitar pukul 3 sore dan langsung melakukan upaya mediasi pada para pemberontak dengan tujuan agar mereka mau meletakkan senjatanya dan menyerah.

Tapi yang terjadi malah sebaliknya, para pemberontak kemudian merangsek maju ke arah residen, bupati, dan asisten residen yang sedang berada diatas jembatan kanal mangetan. Rombongan yang terkejut dengan adanya serangan dadakan tersebut akhirnya melakukan tindakan dengan menembak setiap pemberontak yang menyerang. Meski sempat melakukan perlawanan tetapi salah satu diantara pemberontak berhasil maju ke arah Residen dan berduel dengannya. Residen Surabaya sempat melepaskan tembakan untuk melindungi diri tetapi tembakan itu ternyata meleset dan membuatnya jatuh ke sungai mangetan bersama seorang pemberontak tadi. Di Sungai ia melanjutkan

duelnya sampai kemudian asisten residen dan bupati sidoarjo datang bersama opas (pasukan pengaman) dan berhasil membunuh pemberontak tadi. Residen yang ternyata terluka di bagian lutut kanan akhirnya dibawa kembali ke Surabaya.

Setelah kejadian itu para pemberontak (termasuk Kasan Mukmin) akhirnya perlahan mulai pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke desanya masing-masing. Dalam serangan itu tercatat 70 orang tewas pada peristiwa gedangan tersebut. Sementara lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit sidoarjo. Sementara yang lainnya kabur ke pemukiman penduduk. Kasan Mukmin sendiri akhirnya menurut laporan dari panglima KNIL bernama Lan Legger bahwa di malam hari usai kejadian, Kasan Mukmin berhasil dibunuh di desa Sumantoro oleh 25 orang tentara KNIL. Pemberontakan kemudian dapat digagalkan dan Kasan Mukmin dinyatakan tewas oleh laporan pemerintah.

### **Peran Inlandsch Bestuur Dalam Menangani Peristiwa Gedangan**

Inlandsch bestuur (IB) di Sidoarjo mempunyai peran yang sangat mencolok dalam menangani peristiwa gedangan tahun 1904. Peran itu dapat terlihat dalam tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah (dalam hal ini bupati pada pejabat IB bawahannya). Bahkan semua laporan yang ditulis oleh asisten residen pada residen Surabaya merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh para pejabat IB dibawah bupati Sidoarjo. Meskipun para pejabat IB yang termasuk bupati Sidoarjo merupakan bagian dari orang-orang yang dianggap oleh para pemberontak sebagai suruhan pemerintah kolonial. Tetapi, para pemberontak masih menaruh *respect* pada mereka karena para pemberontak hanya mau menyerang para pejabat BB (Binnenlands Bestuur) saja yang dianggap sebagai penyebab permasalahan yang dihadapi rakyat pada waktu itu.

Dimulai dari peran Bupati Sidoarjo Raden Adipati Tjondronegoro yang sejak sebelum terjadinya pemberontakan terus menerus melakukan investigasi terhadap pergerakan Kyai Kasan Mukmin. Hal ini sebagaimana tertulis dalam laporannya seputar peristiwa gedangan ini pada tanggal 30 Mei 1904 yang diterjemahkan oleh Dukut Imam Widodo dalam bukunya berjudul "*Sidoarjo Tempo Doeloe*" bahwa ketika mendapatkan laporan dari Naib Larangan dan Bulungan pada tanggal 24 Mei di desa Sumantoro, Kawedanan Krian ada seorang bernama Kyai Kasan Mukmin yang berkhotbah, dimana isi khotbahnya adalah ajakan untuk melaksanakan perang sabil atau perang suci. Terdorong oleh laporan tersebut maka Bupati Tjondronegoro memerintahkan Naib Larangan dan Bulungan untuk menemui Kyai Kasan Mukmin di desa Sumantoro. Dan hasilnya, diketahui bahwa memang Kyai Kasan Mukmin berniat untuk melakukan perang sabil meskipun belum diketahui kapan akan melakukannya.

Begitu juga peran dari Wedana Krian dan Taman yang juga turut mencari informasi seputar pemberontakan yang akan dilakukan oleh kelompok Kasan Mukmin. Bupati Sidoarjo memanggil wedana Krian pada malam hari tanggal 26 Mei dengan tujuan memberikan tugas kepadanya untuk mencari tahu kebenaran tentang rapat yang selalu diadakan oleh Kyai Kasan Mukmin di rumahnya setiap malam jumat. Setelah itu kemudian wedana Krian menyuruh 2 orang dari Kawedanan Taman untuk melakukan

*cross-check* kebenarannya. Saat hari pelaksanaan pemberontakan juga dapat dilihat kekompakan dari hubungan antar struktur Inlands Bestuur (IB). Mulai dari tingkat terendah yaitu mantri pengairan sampai ke tingkat wedana dan bupati.

Pada tanggal 27 Mei 1904 pukul 07.30 wedana gedangan memberitahu bupati Sidoarjo bahwa di sawah desa Keboan telah berkumpul sekitar 20 orang berpakaian putih-putih dan membawa senjata tajam. Berikutnya pada pukul 9.00 pagi giliran mantri pengairan desa Botokan yang memberikan kabar bahwa selain Kyai Kasan Mukmin juga terdapat banyak orang yang berpakaian serba putih dan bersenjata tajam (Widodo, 2013). Fakta-fakta diatas menunjukkan kerjasama yang baik antara *Inlandsch Bestuur* sesuai dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. Keputusan yang nantinya diambil oleh para pejabat kolonial (BB) di tingkat asisten residen dan residen bahkan sampai ke gubernur jenderal adalah berdasarkan laporan di lapangan yang disampaikan oleh pejabat *Inlandsch Bestuur*. Meski kebanyakan wedana turut serta membantu dalam menangani kasus, tetapi ada juga pejabat *Inlandsch Bestuur* yang memberontak. Pejabat IB tersebut adalah Wedana Bulang yang ternyata mendukung rencana Kyai Kasan Mukmin untuk melakukan perang sabil. Seperti terdapat dalam koran *Het Vaderland* yang terbit pada tanggal 28 Juni 1904 atau sebulan setelah pecahnya peristiwa gedangan. Dalam artikel di koran tersebut dijelaskan isi dari salah satu telegram dari *Java Herald* di Surabaya bahwa :

*".....Terdapat masalah serius dalam pemerintahan Inlandsch Bestuur yang harus diselesaikan oleh Residen Surabaya. Wedana Boelang sempat menolak melaksanakan dakwaan yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo atas desakan dari asisten residen. Beban tersebut berupa pemberian perintah kepada wedana Boelang untuk mengambil polowidjo yang belum cukup matang untuk kepentingan budidaya gula (maksudnya adalah lahan palawija diganti dengan lahan tebu). Tetapi wedana Boelang menolaknya dan memilih untuk tidak memberikan perintah kepada rakyatnya untuk mengosongkan lahannya demi rencana penanaman tebu yang akan dilakukan oleh pemerintah kolonial. Akhirnya pejabat IB tersebut dipindahkan ke distrik / kawedanan lain"* (*Het Vaderland*, 1904).

Dari kejadian tersebut memang terlihat bahwa wedana Boelang menolak untuk mematuhi perintah atasannya dalam hal ini Bupati Tjondronegoro untuk mengganti lahan warga yang sedang ditanami palawija untuk keperluan lahan tebu. Bupati Sidoarjo sendiri dalam kasus ini disuruh atau merupakan tangan kanan dari pemerintah kolonial melalui Residen Surabaya dan asisten residennya. Wedana Boelang lebih memilih untuk memihak rakyatnya yang memang tidak mau lahannya beralih ditanami tebu.

Sementara kasus pasca peristiwa gedangan sendiri terus berlanjut, disebutkan bahwa para pemberontak mulai ditangkap dan dipenjara mulai malam hari setelah kejadian. Disini peran *Inlandsch Bestuur* kembali diandalkan untuk mencari para pemberontak yang sedang bersembunyi di desa-desa sekitar. Setelah itu mereka (para pemberontak yang tertangkap) diserahkan ke pengadilan dan dewan pertanahan untuk diadili. Setelah beberapa bulan pasca kasus pemberontakan gedangan akhirnya para tahanan dijatuhi vonis hukuman. Diantara 62 terdakwa 12 dibebaskan karena kurang bukti keterlibatannya, sementara 50 orang sisanya dijatuhi hukuman 8-16 tahun kerja

paksa. Hal ini dimuat dalam salah satu berita di koran Het Nieuws Van Den Dag yang terbit pada tanggal 3 November tahun 1905 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Setelah audiensi publik selama lebih dari empat bulan dari 19 Juni hingga 28 Oktober dewan pertanahan di Sidoardjo pada hari Sabtu menjatuhkan putusan atas 62 terdakwa di kerusuhan gedangan. Seperti yang telah dilaporkan, dari 62 terdakwa 12 dibebaskan karena kurangnya bukti dan 50 sebelumnya dijatuhi hukuman mulai dari 8 hingga 16 tahun kerja paksa secara berantai. Tiga dari 50 narapidana yang mengalami kehilangan anggota tubuh saat pemberontakan (cacat) menerima hukuman yang lebih sedikit yaitu delapan dan sepuluh tahun kerja paksa”* (Het Nieuws Van Den Dag, 1905).

## **KESIMPULAN**

Pada kasus peristiwa gedangan tanggal 27 Mei tahun 1904 ini dapat terlihat jelas bagaimana kerjasama yang baik antara *Inlandsch Bestuur* pada tiap jabatan yang ada. Meskipun pada akhirnya salah satu wedana yang berasal dari Boelang telah memilih untuk memberontak pada perintah atasannya yaitu Bupati Sidoarjo. Tetapi secara keseluruhan bisa dikatakan kepercayaan para pejabat IB pada Bupati Sidoarjo yang akhirnya mendorong terjalinnya komunikasi yang baik antara pegawai. Struktur *Inlandsch Bestuur* di Sidoarjo juga menjalin kerjasama yang baik dengan *Binnenlands Bestuur* dalam hal ini diwakili oleh Asisten Residen dan Residen Surabaya. Melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh bupati sidoarjo pada asisten residen yang kemudian diteruskan pada residen dan dari residen diteruskan lagi sampai pada gubernur jenderal Hindia-Belanda di Batavia.

Kemudian dari laporan-laporan tingkat terendah sampai tertinggi itulah pemerintah kolonial bisa memutuskan untuk mengambil tindakan pada kasus pemberontakan gedangan ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam fakta-fakta sejarah di bagian pembahasan, pada akhirnya pemerintah kolonial memutuskan untuk mengambil tindakan represif dalam membubarkan massa pemberontak. Padahal sebetulnya jika kita melihat upaya-upaya penyelesaian konflik, harus ada yang dinamakan tindakan preventif atau pencegahan. Dalam kasus peristiwa gedangan tanggal 27 Mei tahun 1904 ini tidak terlihat upaya preventif diambil oleh pemerintah baik dari *Inlandsch Bestuur* (IB) maupun *Binnenlands Bestuur* (BB). Maka, disinilah letak minus dari peran pemerintahan kolonial dalam menangani peristiwa gedangan. jika tindakan preventif atau pencegahan telah dilakukan paling tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan represif.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Buku dan Jurnal**

- Widodo, D. I. 2013. *Sidoardjo Tempo Doeloe*. Surabaya : Dukut Publishing.
- Sejarah Sidoarjo*. 2009. Sidoarjo : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo.
- Kartodirdjo, S. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya
- Sutherland, H. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta : Sinar Harapan

Umroh, U. A. 2017. *KYAI HASAN MUKMIN (Studi Tentang Perannya Memimpin Perlawanan Petani Pada Pemerintah Kolonial Belanda di Gedangan 1904)*. Skripsi diterbitkan. Surabaya : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Arsip dan Dokumen**

*Dagblad. 30 Juni 1904. De opstand in Gedangan. hlm 1*

*Het Nieuws Van Den Dag. 22 Juni 1905. De Gedangan-zaak. hlm 6*

*Het Nieuws Van Den Dag. 3 November 1905. De Gedangan-zaak. hlm 6*

*Het Vaderland. 28 Juni 1904. Cultures Mijnwezen, Handel, Rnz. hlm 5*